

**EVALUASI DAN TRANSFORMASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PASCA PENGHAPUSAN E-WARONG DI DESA KUNANGAN KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Isnaini Puji Lestari<sup>1</sup>, Pidayan Sasnifa<sup>2</sup>, Ananda Putri Rohima<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[isna70471@gmail.com](mailto:isna70471@gmail.com)<sup>1</sup>, [sasnifaberka@gmail.com](mailto:sasnifaberka@gmail.com)<sup>2</sup>, [anandaputrirohima@uinjambi.ac.id](mailto:anandaputrirohima@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Policy changes in the distribution of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program highlight the need for an evaluation of the previous distribution system. This study aims to evaluate the implementation of the BPNT program through the e-Warong mechanism and to describe the form of transformation in BPNT distribution following the abolition of e-Warong in Kunangan Village, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency. This research employs a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the e-Warong mechanism was not effectively implemented. Various issues were identified, including inaccurate targeting, inconsistency in the amount of assistance, limited service accessibility, and low satisfaction among beneficiaries. The policy transformation occurred in two forms: referential transformation, which involved a change in the distribution mechanism from non-cash to cash-based, and structural transformation, marked by a shift in implementing actors and an increased role for the village government. Although this transformation indicates an improvement, its implementation still faces challenges such as limited coordination, lack of institutional readiness, and insufficient socialization to beneficiaries. Therefore, the policy change in BPNT distribution in Kunangan Village can be considered an adaptive measure, but further reinforcement is needed to enhance its effectiveness at the local level.*

**Keywords:** BPNT, Policy Evaluation, Policy Transformation, E-Warong, Social Assistance..

**ABSTRAK;** Perubahan kebijakan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyoroti evaluasi pada sistem penyaluran sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui mekanisme e-Warong dan mendeskripsikan bentuk transformasi penyaluran BPNT setelah penghapusan e-Warong di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme e-Warong belum berjalan secara optimal. Ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, jumlah bantuan yang tidak sesuai, akses layanan yang terbatas, dan tingkat kepuasan masyarakat yang rendah.

---

Transformasi kebijakan dilakukan dalam dua bentuk: transformasi referensial, yaitu perubahan mekanisme penyaluran dari nontunai menjadi tunai; dan transformasi struktural, yakni pergeseran aktor pelaksana dan meningkatnya peran pemerintah desa. Meskipun transformasi ini mengarah pada perbaikan, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan koordinasi, kesiapan lembaga pelaksana, dan kurangnya sosialisasi kepada KPM. Dengan demikian, perubahan kebijakan penyaluran BPNT di Desa Kunangan dapat dikatakan sebagai langkah adaptif, namun masih perlu penguatan dari sisi pelaksanaan di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** BPNT, Evaluasi Kebijakan, Transformasi Kebijakan, E-Warong, Bantuan Sosial.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial terbesar di Indonesia. Meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan, tingkat kemiskinan di sejumlah daerah, terutama di kawasan pedesaan, masih tetap tinggi. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama, telah mengupayakan berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi pada saat ini, sekaligus upaya untuk pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menjalankan berbagai program bantuan sosial (bansos) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Salah satu bentuk bansos yang signifikan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program BPNT adalah bentuk bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai kepada masyarakat miskin sebagai wujud nyata hadir mengatasi kemiskinan dan ketahanan pangan. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya secara lebih layak dan terjamin. Menurut *Pedoman Umum BPNT Tahun 2018*, yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial di bidang pangan yang disalurkan secara non tunai oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setiap bulan. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui mekanisme akun elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di tempat penjualan yang telah ditunjuk, yaitu e-

---

warong yang bekerja sama dengan bank penyalur seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN untuk dapat menyalurkan bantuan tersebut.

E-warong diperkenalkan pada tahun 2016, sebagai platform digital berbasis teknologi yang berfungsi sebagai titik distribusi bantuan sosial non tunai yang bertujuan untuk mendukung visi pemerintahan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, dalam implementasinya, e-warong menuai berbagai persoalan, mulai dari kualitas pangan yang buruk, keterlibatan pihak swasta yang dominan, monopoli agen, hingga praktik tidak transparan dalam pemilihan komoditas. Evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, e-warong tidak memberikan keleluasaan kepada KPM dalam memilih barang, serta terjadi ketidak sesuaian harga pasar. Hal ini menjadi titik krisis akuntabilitas program yang mendorong Kemensos untuk melakukan evaluasi besar terhadap keberadaan e-warong dalam skema penyaluran BPNT.

Sejak tahun 2021, seiring dengan diluncurnyanya kebijakan baru oleh Kemensos, model e-warong secara perlahan dihapus dan digantikan dengan skema penyaluran yang lebih fleksibel. Perubahan mekanisme ini juga di latarbelakangi oleh berbagai temuan penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan dalam bentuk barang (sembako pangan). Hal ini mendorong Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI untuk merekomendasikan penyaluran bantuan sosial ke depan dilakukan dalam bentuk uang tunai yang dapat ditarik langsung oleh KPM melalui ATM. Dengan sistem ini, KPM memiliki keleluasaan lebih dalam untuk membelanjakan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tanpa harus berantung pada agen penyalur atau e-warong.

Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu wilayah yang terdampak oleh kebijakan penghapusan e-warong dalam program BPNT. Dahulunya e-warong Maju Bersama yang di kelola oleh Ibu Inayati selaku ketua atau pemilik tempat e-warong menjadi alternatif dalam penyaluran dan pengambilan bantuan sosial masyarakat yang berada di Desa kunangan. Pasca penghapusan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui e-warong oleh Kementerian Sosial, aktivitas e-warong di berbagai daerah mengalami perubahan signifikan, termasuk di Desa Kunangan. e-warong yang sebelumnya menjadi salah satu sarana utama dalam penyaluran bantuan BPNT kini tidak lagi aktif secara kelembagaan.

---

Perubahan kebijakan seperti penghapusan e-warong, mencerminkan dinamika relasi antara negara dan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Oleh karena itu, pengkajian terhadap implementasi kebijakan ini di tingkat lokal menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan BPNT pasca penghapusan e-warong, khususnya di wilayah perdesaan, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.

Artikel penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perubahan mekanisme penyaluran BPNT setelah penghapusan *e-warong* di Desa Kunangan. Evaluasi akan meliputi aspek **ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan aksestabilitas**, serta persepsi KPM terhadap sistem penyaluran yang baru. Selain itu, artikel ini juga akan menganalisis tantangan dan peluang dalam transportasi penyaluran BPNT di wilayah tersebut.

## LANDASAN TEORISTIS

### 1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan langkah penting yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik atau konstituen. Melalui evaluasi, dapat diketahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, termasuk kesenjangan antara harapan dengan kenyataan di lapangan.

Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan adalah kegiatan mengukur atau menilai efektivitas dari suatu kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, apakah tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Teori William N. Dunn membagi tiga indikator evaluasi kebijakan, yaitu: Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Ketepatan Jumlah. Adapun teori evaluasi menurut Nur Cholis evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan ataupun kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1). Evaluasi Tahap Perencanaan, 2). Evaluasi Tahap Pelaksanaan, 3). Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- a. Efektivitas
- b. Efesiensi
- c. Kecukupan
- d. Resposivitas
- e. Ketepatan

## **2. Transformasi Kebijakan Publik**

Secara harfiah, kata *transformasi* berasal dari bahasa Inggris *transform*, yang berarti mengubah atau mengalihkan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam ranah kebijakan publik, transformasi diartikan sebagai proses perubahan yang menyeluruh terhadap sistem kebijakan, baik dalam hal perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasinya.

Transformasi kebijakan publik merupakan suatu bagian dari dinamika sistem pemerintahan dalam menyesuaikan respons terhadap kebutuhan masyarakat, perubahan lingkungan sosial dan politik, serta koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak efektif.

Menurut Theodoulou dan Kofinis menjelaskan bahwa transformasi kebijakan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan terhadap kebijakan publik perubahan yang dilakukan terhadap kebijakan publik untuk menjawab ketidakefisienan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian kebijakan dengan realitas sosial politik. Transformasi tidak selalu berarti mengganti seluruh isi kebijakan, melainkan dapat berupa penyesuaian cara kerja, pelaksanaan, struktur hubungan, atau alat kebijakan yang digunakan tanpa mengubah tujuan kebijakan utama.

Theodoulou dan Kofinis membagi transformasi kebijakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

- a. Tranformasi Referensial

Transformasi ini terjadi ketika tujuan kebijakan tetap sama, tetapi terjadi perubahan dalam pendekatan, strategi, atau prosedur pelaksanaan. Transformasi jenis ini sering terjadi saat kebijakan sebelumnya dianggap tidak efektif, sehingga dilakukan perubahan mekanisme agar hasilnya lebih optimal.

**b. Transformasi Struktural**

Transformasi ini merujuk pada perubahan peran aktor pelaksana, hubungan kelembagaan, struktur birokrasi, atau pelimpahan kewenangan baru. Transformasi struktural dapat mengubah siapa yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan dan bagaimana hubungan antar aktor terjalin.

Dalam kajian transformasi kebijakan publik, penting untuk memahami bahwa perubahan suatu kebijakan tidak selalu berlangsung secara radikal dan instan, tetapi melalui proses bertahap yang dapat dianalogikan dengan konsep metamorfosis dalam desain atau arsitektur. Proses transformasi kebijakan publik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan perencanaan yang matang dan berlangsung secara bertahap.

**3. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Grindle menyatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada konten kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada cara pelaksanaannya. Mereka mengidentifikasi enam variabel utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan. Dalam penelitian ini, teori tersebut diterapkan untuk memancarkan pelaksanaan penyaluran BPNT melalui e-Warong di Desa Kunangan, serta untuk mengidentifikasi hambatan atau kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan sebelum terwujudnya sistem transformasi.

**4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara berkala. Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan inklusi keuangan dalam penyaluran bantuan sosial.

Salah satu fitur utama dari program ini adalah penyalurannya dalam bentuk non-tunai melalui mekanisme akun elektronik yang khusus digunakan untuk pembelian bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang telah bekerja sama dengan bank. Dengan menggunakan akun elektronik ini, KPM dapat memperoleh akses ke berbagai jenis bahan pangan sesuai kebutuhan mereka yang telah disediakan di e-warung.

Program BPNT melibatkan serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pihak, melalui dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, bank, e-warung, dan tentu saja KPM. Tahapan tersebut mencakup:

- a. Persiapan
- b. Sosialisasi Edukasi
- c. Registrasi atau Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d. Penyaluran Bantuan

Tujuan utama dari Program BPNT adalah untuk meringankan beban pengeluaran KPM dengan menyediakan bantuan pangan secara berkala. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial. Manfaat dari BPNT meliputi peningkatan ketahanan pangan di kalangan KPM, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu-isu kunci yang muncul dari data yang terkumpul.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Evaluasi Penyaluran Bantuan**

Evaluasi dalam konteks ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaksanaan penyaluran BPNT apakah program ini sudah berjalan secara optimal atau masih terdapat kendala-kendala sehingga kebijakan baru yang dibuat masih belum dikatakan efektif. Tujuan peneliti adanya mengevaluasi ini untuk meneliti sejauh mana penyaluran program BPNT berjalan dari mekanisme sebelumnya hingga mekanisme yang baru dengan kebijakan *e-warong* dihapuskan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa **indikator utama**, yaitu: ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, kepuasan KPM, dan Aksesibilitas Layanan.

**1. Ketepatan Sasaran**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penghapusan *e-warong* dan perubahan mekanisme penyaluran tidak berdampak signifikan terhadap ketepatan sasaran penerima BPNT. Kriteria penerima bantuan tetap mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, yang secara berkala diverifikasi dan diperbarui. Pihak Dinsos menyatakan bahwa proses verifikasi data KPM terus berjalan sesuai prosedur, sehingga validitas data penerima tetap terjaga. Pendamping/TKSK juga melaporkan bahwa kasus salah sasaran atau penerima yang tidak memenuhi kriteria cenderung minim setelah peralihan sistem ini. KPM sendiri merasa bahwa bantuan yang mereka terima memang ditujukan bagi keluarga yang membutuhkan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa dasar data penerima tetap menjadi fondasi kuat dalam menjaga akurasi penyaluran.

**2. Ketepatan Waktu**

Evaluasi terhadap ketepatan waktu penyaluran menunjukkan variasi dan tantangan baru setelah peralihan dari sistem *e-warong* ke pencairan tunai, terutama melalui PT Pos atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sebelumnya, *e-warong* memberikan fleksibilitas waktu bagi KPM untuk menukar bantuan dalam periode tertentu. Namun, pasca perubahan, ketepatan waktu sangat bergantung pada jadwal dan koordinasi dari pihak penyalur (PT Pos/Himbara) serta kapasitas layanan mereka.

Beberapa KPM melaporkan bahwa penyaluran tunai seringkali dilakukan secara serentak dalam satu waktu tertentu untuk banyak KPM, yang menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang cukup lama. Meskipun informasi jadwal penyaluran diupayakan untuk

---

disampaikan secara tepat waktu oleh pendamping atau perangkat desa, KPM terkadang harus mengalokasikan seluruh hari hanya untuk mengurus pencairan bantuan. Hal ini berbeda dengan era *e-warong* di mana KPM dapat sewaktu-waktu datang ke agen untuk menukar bantuan tanpa harus menunggu antrean massal. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pencairan dari jadwal yang seharusnya juga masih terjadi, yang berdampak pada perencanaan keuangan KPM.

### 3. Ketepatan Jumlah

Aspek ketepatan jumlah bantuan menunjukkan peningkatan positif setelah penghapusan *e-warong*. KPM secara konsisten menyatakan bahwa bantuan tunai yang mereka terima umumnya sesuai dengan nominal yang seharusnya, tanpa adanya potongan atau pengurangan. Isu-isu yang sering muncul pada sistem *e-warong* sebelumnya, seperti harga bahan pangan yang di atas rata-rata pasar, keterbatasan pilihan komoditas, atau praktik "paket" sembako yang telah ditentukan, kini telah tereliminasi. KPM merasa lebih transparan dan yakin terhadap jumlah uang yang masuk ke tangan mereka. Pendamping/TKSK juga mengonfirmasi bahwa keluhan terkait jumlah bantuan yang tidak utuh sangat jarang terjadi dalam mekanisme penyaluran tunai ini, menunjukkan efektivitas sistem dalam memastikan integritas nominal bantuan.

### 4. Kepuasan KPM

Tingkat kepuasan KPM terhadap sistem penyaluran BPNT pasca penghapusan *e-warong* bersifat bervariasi, namun mayoritas KPM cenderung menyatakan kepuasan terhadap fleksibilitas yang ditawarkan oleh bantuan tunai.

- a) Aspek Positif (Kebebasan dan Pilihan): Sebagian besar KPM merasa bahwa sistem pencairan tunai lebih baik dan lebih efektif dibandingkan *e-warong*. Kebebasan untuk memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhan keluarga, membeli di toko mana pun, dan membandingkan harga menjadi poin utama kepuasan. Mereka tidak lagi terikat pada stok atau kualitas barang yang disediakan oleh *e-warong*. Fleksibilitas ini memungkinkan KPM untuk mengoptimalkan penggunaan dana bantuan sesuai preferensi dan kebutuhan gizi keluarga.
- b) Aspek Negatif (Tantangan Operasional): Namun, beberapa KPM, terutama yang berusia lanjut atau memiliki keterbatasan fisik, menyatakan bahwa proses pencairan tunai terkadang lebih sulit karena harus mendatangi lokasi terpusat dan

menghadapi antrean. Meskipun demikian, mereka umumnya tetap mengakui keuntungan dari fleksibilitas penggunaan dana. Pemilik *e-warong* yang diwawancara juga menyadari perubahan preferensi KPM dan tantangan adaptasi bisnis mereka.

### **B. Transformasi Penyaluran Bantuan**

Transformasi penyaluran bantuan sosial, khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), merupakan aspek penting dalam memahami bagaimana kebijakan publik beradaptasi terhadap dinamika sosial dan kelembagaan di tingkat lokal. Di Desa Kunangan, transformasi ini ditandai dengan perubahan mekanisme penyaluran dari sistem *e-warong* (non-tunai) menuju sistem pencairan tunai setelah kebijakan penghapusan *e-warong* oleh pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Theodoulou dan Kofinis, yaitu terdapat dua jenis karakter transformasi kebijakan publik.

#### 1. Transformasi Referensial

Transformasi Referensial merupakan bentuk perubahan kebijakan yang tidak mengubah tujuan pokok kebijakan, melainkan merombak cara atau instrumen pelaksanaannya. Menurut Theodoulou dan Kofinis, transformasi ini bertujuan menyederhanakan proses, memperbaiki efektivitas, dan menghilangkan kendala teknis yang dihadapi pada kebijakan sebelumnya.

Transformasi ini dimana sistem bantuan yang sebelumnya berbentuk nontunai melalui *e-warong* diubah menjadi sistem tunai melalui PT Pos atau bank Himbara. Transformasi ini memberi keleluasaan dan fleksibilitas bagi KPM dalam menggunakan bantuan sesuai kebutuhan mereka sendiri.

#### 2. Transformasi Struktural, yaitu pergeseran aktor pelaksana dari dominasi *e-warong* dan pendamping sosial ke perilaku lebih aktif pemerintah desa dalam membantu proses distribusi dan sosialisasi. Meski demikian, belum ada struktur koordinatif yang kuat, pelatihan teknis, ataupun SOP pelaksanaan yang jelas dari pemerintah pusat, sehingga masih terjadi kebingungan di tingkat lokal. Transformasi ini dinilai sebagai langkah positif untuk meningkatkan fleksibilitas, transparansi, dan kemandirian KPM. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya kesiapan kelembagaan, keterbatasan komunikasi antar lembaga, serta kurangnya sosialisasi resmi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, transformasi ini belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya.

Dengan demikian, berdasarkan teori transformasi kebijakan oleh Theodoulou dan Kofinis, penyaluran BPNT pasca penghapusan e-warong di Desa Kunangan mengalami transformasi ganda, yaitu dimana perubahan dalam pendekatan teknis (referensial) serta perubahan struktur pelaksana dan peran kelembagaan (struktural). Kedua bentuk transformasi ini merupakan bentuk adaptasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, meskipun masih menyisakan tantangan dalam pelaksanaan di tingkat lokal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengevaluasi dampak transformasi penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Kunangan, Muaro Jambi, pasca penghapusan *e-warong*. Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya, terlihat adanya kendala dan inefektivitas pada mekanisme atau sistem lama yang mendorong diperlukannya perubahan. Transformasi kebijakan menjadi penyaluran tunai merupakan respons terhadap permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk mengatasi kesalahan sebelumnya tanpa mengubah tujuan utama program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan KPM.

Dalam praktiknya, meskipun kebijakan baru ini berhasil menjaga ketepatan sasaran dan jumlah bantuan, serta meningkatkan kepuasan KPM melalui fleksibilitas dalam berbelanja, nyatanya perubahan kebijakan baru juga masih terdapat kekurangan. Tantangan signifikan muncul pada ketepatan waktu dan aksesibilitas layanan, di mana KPM kini menghadapi antrean panjang dan beban biaya serta kesulitan transportasi yang lebih besar. Dengan demikian, meskipun sistem baru memberikan otonomi yang lebih besar, efektivitas menyeluruh program BPNT di daerah pedesaan ini sangat bergantung pada mitigasi hambatan aksesibilitas dan transportasi yang kini menjadi beban langsung bagi KPM.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada Pemerintah Daerah (Dinas Sosial dan instansi terkait) untuk mempertimbangkan optimalisasi titik-titik penyaluran di tingkat desa atau dusun yang lebih dekat dengan KPM, mungkin melalui agen Laku Pandai atau fasilitas umum desa, serta mengkoordinasikan jadwal penyaluran yang lebih terstruktur dengan lembaga penyalur guna mengurangi antrean. Penting juga bagi pemerintah daerah untuk mengkaji kemungkinan penerapan program *pilot project* atau subsidi transportasi bagi KPM yang sangat sulit menjangkau lokasi pencairan, terutama lansia dan disabilitas, demi

---

memastikan nilai bantuan tidak berkurang signifikan karena biaya akses. Sementara itu, lembaga penyalur (PT Pos Indonesia dan Himbara) perlu meningkatkan kapasitas layanan mereka dan mempertimbangkan diversifikasi mekanisme pencairan, seperti layanan jemput bola di titik strategis. Pemerintah Desa Kunangan diharapkan berperan lebih aktif sebagai fasilitator informasi dan koordinator antara KPM dengan pihak penyalur, serta melakukan pendataan KPM yang terkendala transportasi. Bagi KPM sendiri, perencanaan keuangan yang bijak dan keaktifan mencari informasi sangat dianjurkan. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang terhadap pola konsumsi pangan, melakukan studi perbandingan antar wilayah, serta menganalisis potensi teknologi keuangan digital dalam penyaluran bansos di daerah pedesaan guna mengatasi isu aksesibilitas

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim Penyusun. Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah. Revisi Tahun 2024.
- Theodoulou, Stella. Z., & C. Kofinis. *The art of the game: understanding public policy*, Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2004.
- Usman, H. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

**JURNAL INOVASI HUKUM**

Vol 6, No. 3, Juli 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

---